Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang Tahun 1934: Faktor, Proses, dan Dampak bagi Kesultanan Dompu

Inayyah Suci Ramadhan Putri
UIN Sunan Ampel Surabaya
putriinayyah47gmail.com

Abstrak: Pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang pada tahun 1934 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Kesultanan Dompu yang memperlihatkan dinamika hubungan antara kekuasaan lokal dan pemerintah kolonial Belanda. Kajian mengenai Kesultanan Dompu telah banyak membahas perkembangan politik dan pemerintahan, tetapi kajian yang secara khusus membahas faktor penyebab dan proses pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin serta menguraikan proses pengasingannya ke Kupang pada tahun 1934. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian mencakup dokumen sejarah, literatur mengenai Kesultanan Dompu, serta artikel dan tulisan relevan yang berkaitan dengan peristiwa pengasingan tersebut. Pendekatan historis digunakan untuk memahami pengasingan dalam konteks hubungan politik antara Kesultanan Dompu dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin berkaitan dengan ketegangan mengenai pelaksanaan kontrak politik dan kewajiban ekonomi serta konflik internal terkait pewarisan takhta. Persoalan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik yang berujung pada pencopotan Sultan dan pengasingannya ke Kupang. Kajian ini dapat memperkaya historiografi lokal Dompu dan memberikan pemahaman mengenai intervensi kolonial terhadap kekuasaan kesultanan di Nusa Tenggara Barat.

Kata Kunci: *Sultan Muhammad Sirajuddin, Pengasingan, Kupang, Kesultanan Dompu, Kolonialisme.*

PENDAHULUAN

Proses masuknya kekuasaan kolonial ke wilayah Nusantara tidak pernah berlangsung dengan pola yang sama di setiap daerah. Ada kerajaan atau kesultanan yang memilih jalan akomodatif dengan menandatangani berbagai perjanjian politik demi mempertahankan legitimasi kekuasaannya, tetapi tidak sedikit pula yang memilih bertahan dengan cara konfrontatif meskipun harus menanggung konsekuensi yang berat. Fenomena semacam ini banyak ditemukan di kawasan Indonesia Timur, termasuk di gugusan Nusa Tenggara yang sejak era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)

hingga masa Pemerintah Hindia Belanda memang menjadi salah satu sasaran utama perluasan kekuasaan kolonial.

Kesultanan Dompu di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu wilayah yang turut merasakan dinamika hubungan dengan pemerintah kolonial tersebut. Sama seperti pola yang berlaku di kesultanan-kesultanan lain di kawasan timur Nusantara, campur tangan Belanda terhadap tata pemerintahan lokal biasanya ditempuh lewat kombinasi tekanan politik, kebijakan pajak, dan upaya memecah kekuatan di dalam istana (Sukarddin dan Hidayati, 2025). Pola intervensi seperti ini pada akhirnya juga mewarnai jalannya pemerintahan Kesultanan Dompu, yang menunjukkan sikap penentangan terhadap sejumlah kebijakan politik Pemerintah Hindia Belanda, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak politik sebagaimana tercatat dalam arsip kontrak pemerintah kolonial dengan raja-raja pribumi (ANRI, K.74, No. 300), dan kewajiban ekonomi yang dinilai merugikan kesultanan.

Penelitian Nuryahman dan rekan-rekannya memperlihatkan bahwa hubungan Sultan Muhammad Sirajuddin dengan pemerintah kolonial tidak dapat dipahami hanya dari keberadaan perjanjian politik. Meskipun Kesultanan Dompu terikat kontrak yang diperbarui pada 1905, pelaksanaannya menimbulkan persoalan karena sejumlah ketentuan membatasi ruang gerak pemerintah kesultanan, termasuk dalam urusan pajak, perdagangan hasil bumi, dan pengangkatan penguasa. Sultan tidak selalu menerima kebijakan tersebut, terutama ketika pelaksanaannya dinilai memberatkan masyarakat Dompu. Sikap inilah yang membantu menjelaskan mengapa hubungan antara pihak istana dan pemerintah Hindia Belanda semakin tegang (Nuryahman dkk., 2024: 50-53).

Akar ketegangan antara Sultan Muhammad Sirajuddin dan pemerintah kolonial sebenarnya berpangkal pada kontrak politik yang telah disepakati sebelumnya, terutama menyangkut kewajiban penyerahan pajak hasil bumi rakyat Dompu kepada Hindia Belanda. Karena Sultan cenderung setengah hati dalam memenuhi kewajiban tersebut, hubungan Kesultanan Dompu dengan pemerintah kolonial pun kian memanas dari tahun ke tahun (Wandung, 2024). Belanda kemudian memanfaatkan celah ini dengan menjalankan politik *devide et impera*, terutama pada isu pewarisan takhta, sehingga posisi Sultan Sirajuddin di dalam istananya sendiri berangsur-angsur melemah.

Bachrizal Bakhtiar D. dalam Hitam Putih Dompu Tercinta juga menggambarkan ketegangan tersebut melalui penolakan Sultan Muhammad Sirajuddin terhadap penempatan pejabat Belanda dalam pemerintahan kesultanan. Sikap Sultan ini

memperlihatkan bahwa persoalan dengan pemerintah kolonial bukan hanya menyangkut kewajiban dalam perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan upaya mempertahankan ruang pengambilan keputusan di lingkungan istana Dompu (Bakhtiar, 2016: 24).

Ketegangan itu memuncak pada tahun 1934. Pemerintah Hindia Belanda akhirnya mengambil keputusan menurunkan Sultan Muhammad Sirajuddin dari takhta dan menempatkannya sebagai tahanan politik. Sultan lalu dibuang bersama kedua putranya ke Kampung Air Mata, Kota Kupang, sebagai konsekuensi atas sikapnya yang dinilai sudah tidak sejalan lagi dengan kepentingan kolonial. Selama masa pengasingan, Sultan tetap mengisi hari-harinya dengan kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya, hingga akhirnya wafat beberapa tahun kemudian tanpa pernah lagi menginjakkan kaki di tanah kelahirannya (Bakhtiar, 2016: 26).

Peristiwa pengasingan ini membawa dampak yang tidak kecil bagi kelangsungan pemerintahan Kesultanan Dompu. Kekosongan kepemimpinan yang muncul setelahnya membuka celah bagi upaya penggabungan wilayah kesultanan ke dalam struktur kekuasaan kesultanan tetangga pada periode berikutnya, sebagaimana tercatat dalam arsip penggabungan (ANRI, K.74, No. 304), sebuah pola yang juga banyak dijumpai di kesultanan-kesultanan lain di kawasan ini ketika kepemimpinan lokalnya berhasil dilumpuhkan oleh kebijakan kolonial (Sukarddin dan Hidayati, 2025). Dengan begitu, persoalan pengasingan Sultan Sirajuddin sebenarnya bukan semata persoalan pribadi sang Sultan, melainkan bagian dari pola umum intervensi kolonial terhadap kerajaan-kerajaan lokal di Nusa Tenggara pada paruh pertama abad ke-20.

Sayangnya, penelusuran penulis menunjukkan bahwa kajian akademis yang secara khusus membahas peristiwa pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin masih sangat terbatas, apalagi bila dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir. Salah satunya karya ilmiah yang secara langsung mengangkat topik ini dalam rentang waktu tersebut adalah skripsi mahasiswa Universitas Nusa Cendana yang terbit pada tahun 2024 (Wandung, 2024), sementara publikasi berupa artikel jurnal yang membahas topik ini secara spesifik belum penulis temukan. Kajian mengenai dinamika politik kolonial di kesultanan-kesultanan sekitar Dompu, misalnya penelitian tentang perlawanan rakyat terhadap intervensi Belanda di Kesultanan Bima yang terbit tahun 2025 (Sukarddin dan Hidayati, 2025), memang memberi gambaran umum mengenai pola relasi kolonial di kawasan ini, tetapi belum menjawab secara khusus apa yang terjadi di Kesultanan Dompu pada masa Sultan Sirajuddin.

Minimnya kajian akademik terbaru inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa penelitian ini dirasa perlu dilakukan. Informasi tentang pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin selama ini lebih banyak beredar dalam bentuk tradisi lisan masyarakat Dompu maupun tulisan populer di media daring, yang meski berguna sebagai data awal, belum sepenuhnya memenuhi kaidah penulisan sejarah yang mensyaratkan verifikasi sumber secara ketat. Atas dasar itu, penulis memandang perlu adanya penelitian lanjutan yang menempatkan berbagai versi narasi yang beredar ke dalam kerangka historis yang lebih sistematis, dengan tetap berpijak pada temuan skripsi terdahulu sekaligus memperkaya sudut pandang melalui penelusuran sumber tambahan, baik primer maupun sekunder.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada dua persoalan utama: faktor-faktor yang mendorong pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang pada tahun 1934, dan bagaimana proses pengasingan tersebut berlangsung. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya historiografi lokal Kesultanan Dompu sekaligus menjadi salah satu rujukan akademis yang relevan, mengingat masih terbatasnya publikasi ilmiah mutakhir mengenai topik ini. Untuk menjawab kedua persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang meliputi empat tahap, yaitu heuristik atau pengumpulan sumber, kritik sumber untuk menguji keabsahan data, interpretasi atas fakta-fakta yang telah diverifikasi, dan historiografi sebagai tahap penulisan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin

Jika ditelusuri lebih jauh, akar persoalan yang membawa Sultan Muhammad Sirajuddin ke pengasingan sebenarnya sudah terlihat sejak lama sebelum keputusan resmi diambil pada tahun 1934. Sultan naik takhta menggantikan ayahnya, Sultan Abdullah II, dan terikat pada kontrak panjang dengan pemerintah Hindia Belanda yang pertama kali disepakati pada 21 Oktober 1886 dan terus diperbarui, termasuk melalui kontrak Pemerintahan Sendiri Dompu yang ditandatangani pada 31 Desember 1905 dan diratifikasi setahun berikutnya (mbojoklopedia, 2019). Di dalam kontrak itu tercantum sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi Sultan sebagai imbalan atas pengakuan Belanda terhadap kedudukannya sebagai penguasa Dompu.

Pada praktiknya, Sultan Sirajuddin dikenal setengah hati menjalankan isi kontrak tersebut. Ia jarang menyerahkan pajak kelapa dan hasil bumi kepada Belanda,

enggan melibatkan Belanda dalam urusan pemerintahan internal kesultanan, menolak sistem kerja paksa bagi rakyatnya, serta menolak kewajiban menjual hasil bumi kepada pihak kolonial (mbojoklopedia, 2019). Sikap ini membuat Belanda menilai Sultan sebagai penguasa yang tidak kooperatif, dan sejak sekitar tahun 1917 keluhan resmi terhadap perilakunya mulai bermunculan dalam catatan-catatan pemerintah kolonial.

Selain soal pajak dan kontrak politik, faktor lain yang turut mempercepat jatuhnya Sultan adalah konflik internal di dalam istana, khususnya menyangkut siapa yang berhak mewarisi takhta. Sultan sempat menunjuk putra sulungnya, Abdul Wahab Sirajuddin, sebagai Raja Muda yang kelak akan menggantikannya, tetapi penunjukan ini ditentang oleh adiknya, Abdullah Sirajuddin, yang juga menginginkan kekuasaan tersebut. Perseteruan dua bersaudara ini terdengar sampai ke telinga Residen Kupang, yang kemudian memanggil Sultan Sirajuddin untuk meredam konflik tersebut, namun usaha itu dianggap gagal, bahkan Belanda menuding Sultan sengaja mengipasi konflik demi kepentingannya sendiri (Kambalidompumantoi, 2015). Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan Belanda untuk menjalankan strategi *devide et impera*, memperlemah posisi Sultan dari dalam istananya sendiri.

Jejak kontrak-kontrak tersebut juga dapat dilacak pada sumber primer. Dalam daftar arsip kontrak pemerintah kolonial dengan raja-raja pribumi, kontrak tercatat sebagai entri tersendiri pada kode K.74 nomor 300 (ANRI, K.74, No. 300). Keberadaan entri ini memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah kolonial dan penguasa pribumi memang diikat melalui dokumen tertulis yang diarsipkan secara sistematis, sehingga persoalan pada masa Sultan Sirajuddin sulit dilepaskan dari kerangka kontrak semacam itu. Meski begitu, penulis menyadari bahwa daftar arsip hanya menunjukkan keberadaan dan letak dokumen. Isi kontrak yang berkaitan langsung dengan Dompu masih perlu ditelaah pada berkas aslinya.

Penjelasan tentang sikap Sultan menjadi lebih utuh apabila alasan di balik penolakannya ikut diperhatikan. Menurut Nuryahman dkk. (2004), Sultan menolak kerja rodi karena masyarakat Dompu belum benar-benar pulih dari dampak letusan Tambora, dan menolak perdagangan candu karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sultan juga keberatan terhadap kebijakan yang mengharuskan pajak Dompu disetorkan ke Bima, sebab langkah itu menempatkan Dompu di bawah bayang-bayang kesultanan tetangganya. Dari sudut pandang pemerintah kolonial, rangkaian penolakan ini dibaca sebagai pembangkangan terhadap perjanjian. Alasan resmi yang akhirnya dikemukakan

Belanda mencakup ketidakmampuan Sultan menjaga keamanan wilayah, tidak ditaatinya Perjanjian Bongaya, tidak dibayarnya upeti, serta penolakan terhadap perdagangan candu dan kerja rodi (Nuryahman dkk., 2004).

Dasar Keputusan Pengasingan dan Telaah atas Sumber

Keputusan pengasingan terhadap Sultan Muhammad Sirajuddin tidak diambil secara lisan, melainkan dituangkan dalam keputusan resmi pemerintah kolonial. Nuryahman dkk. (2004) menyebut adanya Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 11 Tahun 1934 yang menetapkan pengasingan seumur hidup bagi Sultan, dan mencatat bahwa keputusan itu bertanggal 15 Januari 1934. Pada Februari 1934, Sultan mengembalikan bintang kehormatan pemberian Belanda kepada Residen Timor sebagai bentuk protes karena merasa ditipu (Nuryahman dkk., 2004). Tindakan simbolis ini menunjukkan bahwa Sultan menolak keputusan tersebut dan menilainya sebagai perlakuan yang tidak adil.

Di bagian ini penulis menemukan perbedaan yang perlu dicatat. Sebagian tulisan populer di media daring menyebut Sultan diturunkan pada 11 September 1934 (Irisnawardani, 2013), sedangkan Nuryahman dkk. (2004) mencatat keputusan pengasingan bertanggal 15 Januari 1934. Perbedaan ini mungkin muncul karena kedua sumber merujuk pada tahap yang berlainan, misalnya penetapan keputusan dan pelaksanaan penurunan takhta, tetapi dugaan itu belum dapat dipastikan tanpa arsip pendukung. Karena itu penulis memperlakukan Keputusan Nomor 11 Tahun 1934 sebagai dasar hukum yang lebih kuat, sementara tanggal 11 September 1934 diposisikan sebagai informasi yang masih menunggu verifikasi arsip.

Keputusan itu tidak hanya menimpa Sultan seorang diri. Bakhtiar (2016) menyebut bahwa kedua putranya, Abdul Wahab dan Abdullah, ikut dibuang karena Belanda khawatir perebutan kekuasaan akan muncul di kemudian hari. Langkah ini dapat dibaca sebagai upaya memastikan tidak ada figur dari lingkungan istana yang segera mengisi kekosongan dan melanjutkan sikap penentangan. Nuryahman dkk. (2004) juga menyebut bahwa pertentangan antara kedua putra Sultan sengaja diprovokasi Belanda sebelum pemerintah kolonial mengumumkan adanya perang saudara pada tahun 1934, sehingga alasan pengasingan tampak berkaitan erat dengan situasi yang turut dibentuk oleh pihak kolonial sendiri.

Proses Pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang

Rangkaian pelanggaran kontrak dan konflik pewarisan takhta pada akhirnya bermuara pada keputusan resmi Pemerintah Hindia Belanda untuk mencopot Sultan Muhammad Sirajuddin dari jabatannya. Ia resmi turun takhta pada 11 September 1934 dan sejak tanggal itu berstatus sebagai tahanan politik yang menjalani *internering* atau pengasingan ke Kupang (Irisnawardani, 2013). Sebagian sumber menyebut proses penurunan takhta ini berlangsung melalui persidangan di kantor *Controlleur* pemerintahan Hindia Belanda di Bima, di mana permintaan Sultan agar disidang di hadapan para penasihat kesultanan justru ditolak (mbojoklopedia, 2019).

Setelah keputusan itu keluar, Sultan Muhammad Sirajuddin diberangkatkan menuju pengasingan bersama kedua putranya, Abdul Wahab Sirajuddin dan Abdullah Sirajuddin, serta beberapa orang kepercayaannya, termasuk pelayan setia bernama Abdurrahman Habe. Rombongan diantar oleh para pejabat dan rakyat Kesultanan Dompu hingga ke Pelabuhan Sape, sebelum akhirnya berlayar menuju Kupang dengan kapal milik Belanda yang oleh masyarakat setempat disebut "Kapal Putih" (Kambalidompumantoi, 2016). Sesampainya di Kupang, rombongan Sultan disambut langsung oleh penguasa setempat, Raja Kupang Nicolas Nicynoi, dan diserahterimakan secara resmi melalui upacara serah terima tawanan, sebelum akhirnya Sultan dititipkan kepada Raja Kupang untuk menjalani masa pengasingannya.

Selama menjalani pengasingan di Kampung Air Mata, Kota Kupang, Sultan Muhammad Sirajuddin tidak lantas menarik diri dari kehidupan sosial. Ia mengisi keseharian dengan berbagai kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan sosial budaya (Wandung, 2024), sikap yang oleh masyarakat setempat maupun keturunannya kemudian dikenang sebagai bentuk ketabahan seorang pemimpin yang tetap menjaga kehormatan meski telah kehilangan takhta. Sultan Muhammad Sirajuddin wafat di tempat pengasingannya pada 14 Februari 1937 dalam usia 89 tahun, dan sejak peristiwa itu masyarakat Dompu menganugerahkan gelar Sultan Manuru Kupa kepadanya, yang secara harfiah berarti "sultan yang diasingkan ke Kupang" (Mujtahidin, 2026). Jenazahnya semula dimakamkan di pekuburan Islam Batu Kadera, Kupang, sebelum akhirnya kerangka jenazahnya dipulangkan ke Dompu pada Januari 2002 dan dimakamkan kembali di kompleks Masjid Agung Baiturrahman Dompu.

Gambaran kehidupan Sultan di Kupang dapat diperinci lebih jauh. Pada sekitar dua bulan pertama, Sultan tinggal di lingkungan istana Raja Kupang, kemudian atas

inisiatif Raja Kupang ia dipindahkan ke Kampung Air Mata yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di kampung itu Sultan menempati rumah sewaan milik warga keturunan Arab selama kurang lebih dua tahun, sebelum berpindah ke rumah sewaan lain di dekatnya (Nuryahman dkk., 2004; Bakhtiar, 2016). Selama menjalani hari-hari tersebut, Sultan rutin beribadah, termasuk salat berjamaah di Masjid Baitul Qadim, dan tetap berinteraksi dengan masyarakat sekitar (Bakhtiar, 2016). Rincian ini penting karena memperlihatkan bahwa pengasingan Sultan tidak berlangsung dalam keadaan terisolasi sepenuhnya, melainkan masih bersinggungan dengan komunitas Muslim setempat yang memberinya ruang untuk menjalani kehidupan religius.

Dampak Pengasingan bagi Kesultanan Dompu

Pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin menyisakan kekosongan kepemimpinan yang cukup lama di Kesultanan Dompu, mengingat kedua putra mahkotanya turut dibuang bersamanya. Kekosongan inilah yang kemudian dimanfaatkan pihak luar untuk menggabungkan wilayah Kesultanan Dompu ke dalam kekuasaan Kesultanan Bima. Upaya penggabungan yang tercatat dalam arsip penggabungan (ANRI, K.74, No. 304) sebenarnya sudah diusahakan Belanda sejak sebelum pengasingan, namun kandas karena penolakan tegas dari Sultan Sirajuddin sendiri; setelah Sultan diasingkan dan tidak ada lagi figur pemimpin lokal yang mampu menahan tekanan tersebut, rencana ini justru terealisasi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, ketika istana Dompu dihancurkan dan wilayahnya digabungkan ke Kesultanan Bima (Nurhaidah, 2023).

Baru pada 1947, setelah masa pendudukan Jepang berakhir dan keluarga Kesultanan Dompu kembali menuntut pemulihan kedaulatannya, putra Abdul Wahab diangkat sebagai Sultan Dompu yang baru dengan gelar Sultan Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin, sekaligus tercatat sebagai raja Dompu yang terakhir (Kambalidompumantoi, 2016). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin bukan hanya menandai berakhirnya satu masa kepemimpinan, tetapi juga menjadi titik balik yang menentukan arah politik Kesultanan Dompu pada dekade-dekade berikutnya, sekaligus memperkuat gambaran tentang pola umum bagaimana kekuasaan kolonial melumpuhkan kerajaan-kerajaan lokal di kawasan Nusa Tenggara.

Kategori penggabungan juga tercatat tersendiri dalam daftar arsip yang sama, yakni pada kode K.74 nomor 304 (ANRI, K.74, No. 304). Pencatatan ini memberi petunjuk bahwa penggabungan wilayah penguasa pribumi diperlakukan sebagai urusan

administratif yang terdokumentasi, bukan sekadar perubahan situasional. Meski demikian, sumber sekunder tidak sepenuhnya seragam dalam menempatkan waktunya. Nuryahman dkk. (2004) menggambarkan bahwa setelah 1934 Kesultanan Dompu dihapuskan dan digabungkan ke Bima di bawah seorang *Gezaghebber* yang dibantu *Jeneli* Dompu dan *Jeneli* Kempo, dengan kekuasaan Belanda di Dompu berakhir pada 1942. Bakhtiar (2016) menyebut Belanda mengangkat Lalu Muhammad Saleh sebagai pejabat *selfbestuur* untuk mengisi kekosongan, lalu pada masa Jepang penggabungan itu berlanjut sehingga periode 1934 sampai 1947 praktis menjadi bagian dari sejarah Bima. Sementara itu, tulisan populer lebih menekankan peristiwa tahun 1942 (Nurhaidah, 2023). Penulis memandang keduanya tidak harus saling meniadakan, sebab penggabungan administratif dapat berlangsung sejak setelah pengasingan dan penegasannya terjadi pada masa pendudukan Jepang.

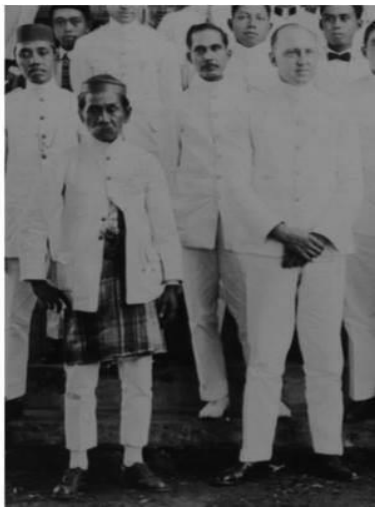
Pemulihan kesultanan baru terjadi setelah masa pendudukan berakhir. Bakhtiar (2016) mencatat bahwa melalui Surat Keputusan Resident Timur Nomor 1 tanggal 12 September 1947, Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin dinobatkan sebagai Sultan Dompu. Ia adalah cucu Sultan Muhammad Sirajuddin dari putranya, Abdul Wahab, dan tercatat sebagai sultan ke-29 sekaligus sultan terakhir. Dalam perjalanan berikutnya ia dipercaya menjadi bupati pertama Dompu pada 1958 hingga 1960 (Bakhtiar, 2016). Dengan demikian garis kesinambungan kesultanan tidak benar-benar terputus, tetapi mengalami jeda panjang sejak pengasingan Sultan pada 1934 hingga pemulihannya pada 1947.

Keterbatasan Sumber dan Arah Verifikasi Arsip

Telaah di atas masih memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, sumber primer yang digunakan baru berupa daftar arsip, yaitu penanda keberadaan dokumen kontrak dan penggabungan pada K.74 nomor 300 dan 304. Permintaan salinan berkas yang memuat isi kontrak maupun keputusan pengasingan telah diajukan ke Arsip Nasional Republik Indonesia dan, pada saat naskah ini disusun, masih berproses sehingga belum dapat dianalisis dalam artikel ini. Kedua, Nuryahman dkk. (2004) disusun sebagai kajian awal untuk mendukung pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Sultan, sehingga sebagian narasinya mungkin cenderung heroik dan perlu dibaca secara kritis. Ketiga, terdapat ketidakkonsistenan kecil antarsumber, misalnya tahun wafat Sultan yang tertulis 1937 pada sebagian besar bagian, tetapi 1939 pada satu bagian lain dalam sumber yang sama.

Dalam kasus ini penulis memilih tahun 1937 karena didukung oleh lebih dari satu sumber (Bakhtiar, 2016; Nuryahman dkk., 2004).

Gambar



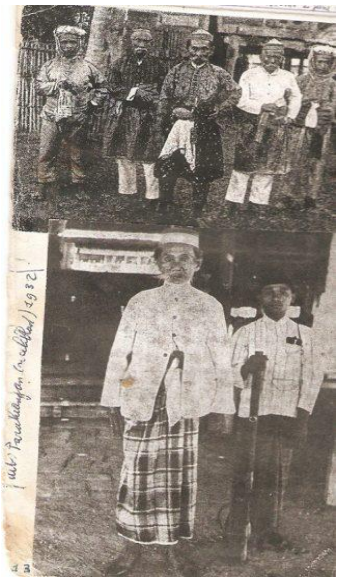
Gambar 1. Sultan Muhammad Sirajuddin bersama Djeneli Kema



Gambar 2. Sultan Muhammad Sirajuddin (berkuda) bersama ketua distrik dan Djeneli Kema depan Istana Dompu tahun 1923
https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sumbawa/sultan-of-dompo/foto-kesultanan-dompu-p-sumbawa/
(Diakses pada 1 Oktober 2026)



Gambar 3. Sultan Muhammad Sirajuddin bersama penasehat dan prajurit, Tahun 1924 https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sumbawa/sultan-of-dompo/foto-kesultanan-dompu-p-sumbawa/ (Diakses pada 1 Oktober 2026)



Sultan dari Dompoe tahun ca. 1927 dan 1931. Sumber donald tick, FB

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasingan Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kupang pada tahun 1934 bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan akumulasi dari pelanggaran kontrak politik terutama menyangkut kewajiban pajak hasil bumi yang diperparah oleh konflik internal perebutan hak waris takhta antara kedua putranya, sebuah celah yang kemudian dimanfaatkan Belanda melalui politik *devide et impera* untuk melumpuhkan posisi Sultan dari dalam istananya sendiri.

Adapun proses pengasingannya berlangsung melalui mekanisme formal pemerintah kolonial: mulai dari penurunan paksa dari takhta pada 11 September 1934, pemberangkatan melalui Pelabuhan Sape menuju Kupang, hingga penyerahan resmi kepada penguasa lokal Kupang, dan berakhir dengan menetapnya Sultan di Kampung Air Mata hingga wafat pada tahun 1937. Dengan demikian, kasus Sultan Sirajuddin memperkuat gambaran umum tentang pola intervensi kolonial terhadap kesultanan-kesultanan kecil di kawasan Nusa Tenggara pada awal abad ke-20, yang cenderung menggabungkan tekanan politik, ekonomi, dan pemanfaatan konflik internal sebagai jalan untuk menundukkan kekuasaan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (t.t.). *Daftar Arsip Statis Tekstual Kontrak Pemerintahan Kolonial (VOC & Hindia Belanda) dengan Raja-raja Pribumi di Kalimantan, Bali, Surakarta, dan Sumatra* (K.74, No. 300 [Kontrak Pembaharuan oleh Kesultanan Dompu dengan Kolonial] dan No. 304 [Penggabungan dengan Kesultanan Bima]). Jakarta: ANRI.

"Bupati Dompu Dukung Perjuangan Gelar Pahlawan Sultan Manuru Kupa". *RRI.co.id*, 29 Juli 2026. https://rri.co.id/mataram/regional/2608494/bupati-dompu-dukung-perjuangan-gelar-pahlawan-sultan-manuru-kupa. Diakses 16 September 2026.

Bakhtiar, Bachrizal D. (2016). *Hitam Putih Dompu Tercinta*, Dompu: t.p.

"Fakta Sejarah, Penjajah Jepang Gabungkan Secara Paksa Kesultanan Dompu ke Bima". *koranlensapos.com*. https://www.koranlensapos.com/2023/01/fakta-sejarah-penjajah-jepang-gabungkan.html. Diakses 16 September 2026.

Fidolinus Wandung. (2024). *Sejarah Pengasingan Sultan Dompu Muhammad Sirajuddin di Kupang Tahun 1934–1937* (Skripsi). Universitas Nusa Cendana, Kupang.

"Foto Kesultanan Dompu/ P. Sumbawa", *Sultansinindonesiaeblog.wordpress.com*, https://sultansinindonesieblog.wordpress.com/sumbawa/sultan-of-dompo/foto-kesultanan-dompu-p-sumbawa/ , Diakses pada 1 Oktober 2026

Nuryahman, I Ketut Sudharma Putra, dan Raj Riana Dyah Prawitasari, *Perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin Menentang Belanda di Dompu Tahun 1886–1934* (Denpasar: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar, 2004), hlm. 50–53.

"Permintaan Terakhir Sang Sultan (Versi Original)". *Kambali Dompu Mantoi*. https://kambalidompumantoi.wordpress.com/2016/02/13/permintaan-terakhir-sang-sultan/. Diakses 16 September 2026.

"Sejarah Bergabungnya Dompu dengan NKRI". *Kambali Dompu Mantoi*. https://kambalidompumantoi.wordpress.com/2015/11/30/sejarah-bergabungnya-dompu-dengan-nkri/. Diakses 16 September 2026.

"Sultan Muhammad Siradjuddin (Sultan Dompu)". https://muhammaddian.wordpress.com/2013/11/16/42/. Diakses 16 September 2026.

Sukarddin, & Sri Wahyu Hidayati. (2025). Perlawanan Rakyat Donggo Kala terhadap Dominasi Politik Belanda di Kesultanan Bima. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 13(1), 1–10.

"Terbuangnya Manuru Kupa dari Tahta". *Mbojoklopedia*. http://www.mbojoklopedia.com/2019/08/terbuangnya-manuru-kupa-dari-tahta.html. Diakses 16 September 2026.